

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ajib Fajar Sepdiana

NPP. 31.0252

Asdaf Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program Studi Keuangan Publik

Email: ajibfajars34@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, MAK, Ak, CA

Email : kangdadang207@yahoo.co.id

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): *The financial independence of local governments refers to the extent to which local governments are able to use local revenues and use regional revenue and expenditure budgets optimally. However, based on data from 2020-2022, East Belitung Regency was only able to generate around 13.27% of its total regional income, this shows that the local government has not been able to maximally utilize its regional potential so that the Regional Original Income (PAD) is still low.* **Purpose:** *The purpose of this study was to analyze the level of financial independence of the local government of East Belitung Regency in the 2020-2022 budget period..* **Methods:** *The method used in this research is qualitative with a descriptive approach and descriptive methods are used for data collection. This study uses the theory of financial ratio analysis including the degree of decentralization of state finances, the degree of regional economic independence and the proportion of regional financial dependence.* **Results:** *which was included in the Less category. The level of regional financial independence of 15.69% is included in the very low category or has an Instructive relationship pattern. The ratio of regional financial dependence of 84.57% is included in the very high category. While the efficiency of regional income is 93.01% which is classified as quite effective.* **Conclusion:** *From the results of the study, it can be concluded that East Belitung Regency is still very low in local government administration. To overcome this problem, researchers recommend that local governments maximize effective socialization to increase taxpayer awareness, increase supervision of local officials and utilize untapped local resources.*

Keywords: *Regional Financial Independence, Financial Ratios, Regional Original Revenue (PAD)*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemandirian keuangan pemerintahan daerah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan pendapatan daerah dan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara optimal. Namun berdasarkan data tahun 2020-2022, Kabupaten Belitung Timur hanya mampu menghasilkan sekitar 13,27% dari total pendapatan daerahnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bisa memanfaatkan potensi daerahnya secara maksimal sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur pada periode anggaran 2020-2022. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode deskriptif digunakan untuk pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan meliputi derajat desentralisasi keuangan negara, derajat kemandirian ekonomi daerah dan proporsi ketergantungan keuangan daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi sebesar 13,27%, yang termasuk dalam kategori Kurang. Tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 15,69% termasuk dalam kategori rendah sekali atau memiliki Pola hubungan Instruktif. Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 84,57% termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan Efisiensi pendapatan daerah adalah 93,01% yang tergolong cukup efektif. **Kesimpulan:** Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Belitung Timur masih sangat rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah memaksimalkan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengawasan terhadap pejabat daerah serta memanfaatkan sumber daya lokal yang belum tergali.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara demokratis, memberikan hak dan kewajiban yang luas kepada warganya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 18, menjelaskan tentang Pemerintahan Daerah dan menegaskan peran penting pemerintah dalam mendorong kemajuan negara dengan fokus pada kesejahteraan umum. Sebagai alat untuk mendukung tujuan nasional ini, otonomi daerah diperkenalkan. Dalam konteks ini UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencerminkan pendekatan desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini berarti setiap wilayah memiliki hak untuk mengelola urusan lokal mereka sendiri, dengan mempertimbangkan potensi unik yang dimiliki oleh setiap daerah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya dan karakteristik khusus dari berbagai wilayah di Indonesia dapat dikelola secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut (Syam & Zulfikar, 2022) salah satu indikator daerah bisa menjalankan otonomi daerah yakni: “Terletak pada keahlian finansial daerah dalam membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah secara derajat ketergantungan terhadap pemerintahan pusat harus memiliki proporsi yang lebih rendah serta diharapkan agar pendapatan asli daerah bisa sebagai elemen terbesar untuk pergerakan dana dalam pelaksanaan otonomi daerah.”

Dalam pelaksanaan otonomi, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaku ekonomi daerah. Mereka perlu secara mandiri membiayai semua kepentingan daerah serta urusan pembangunan wilayah untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemandirian keuangan daerah ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah jika Pemerintah Daerah mampu memperoleh pendapatan yang cukup. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk memperoleh penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah. Hak ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih optimal dalam mengelola potensi daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan dapat mendukung kemandirian pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah sering digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan daerah. (Kuncoro, 2004) mengatakan bahwa cara mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah adalah dengan menggunakan rasio pendapatan utama daerah pada APBD. Untuk mengukur derajat kemandirian keuangan daerah, kita dapat melakukan kalkulasi rasio finansial. (Mahmudi, 2019) memberikan penjelasan juga tentang cara mengukur kemandirian keuangan daerah yang melaksanakan otonomi daerah merujuk pada pendapatan daerah dengan menerapkan beberapa rasio keuangan. Beberapa rasio tersebut antara lain: Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Keuangan daerah secara definisi diartikan sebagai kewajiban dan hak daerah yang bernilai uang. Keuangan yang dimiliki daerah digunakan sebagai pembiayaan urusan daerah tersebut. Menurut (Sinurat & Panjaitan, 2017), “keuangan daerah adalah keseluruhan kewajiban dan hak daerah dalam rangka pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bisa dinilai secara uang, terutama semua bentuk harta yang berkaitan dengan kewajiban dan hak daerah”. Serta menurut (Suwanda, 2019). “Program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka dengan menyusun, merencanakan, melaksanakan, melaporkan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan daerah berkaitan dengan APBD.”

Kabupaten Belitung Timur merupakan wilayah otonom pada tingkat kabupaten, sehingga Kabupaten Belitung Timur berhak untuk menjalankan kepentingan pemerintah. Penyelenggaraan kepentingan pemerintah dilakukan sepadan dengan keadaan tiap-tiap daerah secara memanfaatkan dana yang tersedia dalam APBD, baik pada pendapatan utama daerah ataupun pendapatan pada pusat pemerintahan. Meskipun demikian, dengan dana perimbangan keuangan pada wilayah Kabupaten Belitung Timur masih tergantung pada dana dari pusat, sehingga nilai tukar pendapatan ke kabupaten-kabupaten dengan pendapatan daerah masih sangat besar untuk mendukung usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan kemajuan di daerah untuk melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemandirian yang dapat membantu negara dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara maju. Berikut peneliti tampilkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi indikator keuangan dalam suatu daerah yang dituangkan dalam Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2020-2022
(dalam miliar rupiah)

Sumber : diolah oleh peneliti dari djpk.kemenkeu.go.id

Akun	2020			2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pendapatan Daerah	887,89 M	776,51 M	87,46	853,10 M	846,32 M	99,21	808,70 M	918,61 M	113,59
PAD	122,01 M	102,16 M	83,73	113,26 M	116,08 M	102,49	109,59 M	119,03 M	108,61
Pajak Daerah	74,31 M	58,52 M	78,75	65,36 M	70,54 M	107,93	67,46 M	57,35 M	85,02
Retribusi Daerah	4,46 M	4,08 M	91,44	4,95 M	4,25 M	85,89	4,88 M	4,77 M	97,63
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,20 M	3,53 M	110,22	3,36 M	3,92 M	116,58	3,92 M	4,28 M	109,28
Lain-Lain PAD yang Sah	40,04 M	36,03 M	89,99	39,59 M	37,37 M	94,39	33,33 M	52,63 M	157,90
TKDD	703,51 M	618,21 M	87,88	681,48 M	666,05 M	97,74	648,52 M	741,17 M	114,29
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	703,51 M	618,21 M	87,88	681,48 M	666,05 M	97,74	648,52 M	741,17 M	114,29
Pendapatan Lainnya	62,38 M	56,13 M	89,99	58,36 M	64,19 M	109,99	50,58 M	58,41 M	115,48
Pendapatan Transfer Antar Daerah	46,38 M	37,67 M	81,21	41,46 M	36,77 M	88,69	42,71 M	50,89 M	119,17
Pendapatan Hibah	15,99 M	18,47 M	115,45	0,00 M	0,09 M	17,433,37	0,00 M	0,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0	16,90 M	27,33 M	161,73	7,87 M	7,51 M	95,47
Belanja Daerah	962,77 M	774,27 M	80,42	967,36 M	840,00 M	86,83	901,08 M	875,85 M	97,20
Belanja Pegawai	416,09 M	297,73 M	71,55	361,07 M	329,42 M	91,23	386,95 M	352,30 M	91,05
Belanja Pegawai	416,09 M	297,73 M	71,55	361,07 M	329,42 M	91,23	386,95 M	352,30 M	91,05
Belanja Barang Jasa	245,86 M	242,93 M	98,81	306,42 M	286,74 M	93,58	285,91 M	282,67 M	98,87
Belanja Barang dan Jasa	245,86 M	242,93 M	98,81	306,42 M	286,74 M	93,58	285,91 M	282,67 M	98,87
Belanja Modal	155,93 M	83,17 M	53,34	158,48 M	96,10 M	60,64	102,25 M	123,65 M	120,92
Belanja Modal	155,93 M	83,17 M	53,34	158,48 M	96,10 M	60,64	102,25 M	123,65 M	120,92
Belanja Lainnya	144,88 M	150,43 M	103,83	141,39 M	127,75 M	90,35	125,97 M	117,23 M	93,06
Belanja Hibah	35,16 M	35,00 M	99,53	30,02 M	24,99 M	83,24	18,57 M	17,09 M	91,99
Belanja Bantuan Sosial	0,55 M	1,88 M	340,30	4,32 M	0,30 M	6,99	0,27 M	0,25 M	94,57
Belanja Tidak Terduga	0,50 M	11,38 M	2,276,02	3,75 M	0,64 M	16,97	11,53 M	0,25 M	2,16
Belanja Bagi Hasil	7,88 M	6,36 M	80,68	7,03 M	7,24 M	103,03	7,24 M	6,86 M	94,69
Belanja Bantuan Keuangan	100,80 M	95,83 M	95,07	96,26 M	94,58 M	98,25	88,36 M	92,79 M	105,01
Surplus/(Defisit)	-74,87 M	2,24 M	-2,99	-114,26 M	6,32 M	-5,53	-92,38 M	42,76 M	-46,29
Pembiayaan Daerah	74,87 M	101,45 M	135,49	0,00 M	0,00 M	0	92,38 M	110,77 M	119,91
Penerimaan Pembiayaan Daerah	75,87 M	101,45 M	133,71	114,26 M	104,15 M	91,15	92,88 M	110,77 M	119,26
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74,97 M	100,88 M	134,55	112,66 M	103,68 M	92,03	92,38 M	110,47 M	119,59
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,90 M	0,00 M	0,00	1,60 M	0,47 M	29,14	0,50 M	0,30 M	59,79
Penerimaan Pembiayaan , Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,57 M	0	0,00 M	0,00 M	0	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,00 M	0,00 M	0,26	0,00 M	0,00 M	0	0,50 M	0,00 M	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1,00 M	0,00 M	0,00	0,00 M	0,00 M	0	0,50 M	0,00 M	0,00

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2020 hingga 2022, terdapat beberapa indikasi yang mencerminkan daerah tersebut belum sepenuhnya mandiri, yaitu:

- Ketergantungan pada Transfer Pemerintah Pusat (TKDD):** Dari total pendapatan daerah, sebagian besar berasal dari TKDD, yaitu sebesar 618,21 Miliar Rupiah pada tahun 2020, 666,05 Miliar Rupiah pada tahun 2021, dan 741,17 Miliar Rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Rendah:** PAD merupakan indikator penting dari kemandirian daerah. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022, PAD Kabupaten Belitung Timur cenderung rendah dibandingkan dengan TKDD. Pada tahun 2020, PAD hanya mencapai 102,16 Miliar Rupiah, naik menjadi 116,08 Miliar Rupiah pada tahun 2021, dan naik lagi menjadi 119,03 Miliar Rupiah pada tahun 2022.
- Pajak Daerah yang Rendah:** Salah satu komponen PAD adalah Pajak Daerah. Namun, realisasi Pajak Daerah cenderung rendah, yaitu hanya 78,75% pada tahun 2020 dan 85,02%

pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan.

4. **Belanja Modal yang Rendah:** Belanja modal merupakan indikator investasi daerah. Namun, realisasi belanja modal Kabupaten Belitung Timur cenderung rendah, yaitu hanya 53,34% pada tahun 2020 dan 60,64% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa investasi daerah masih belum optimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Endro Risdiyanto dkk yang berjudul Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua menemukan bahwa Kemiskinan di Provinsi dari tahun 2010 sampai 2021 menunjukkan tren yang menurun tetapi tidak secara signifikan. Di Provinsi Papua masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi Dari Kabupaten/Kota di Provinsi Papua di atas, akan tetapi beberapa kabupaten/kota Kabupaten Deiyai memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi. (Risdiyanto et al., 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Anike Deswira yang berjudul Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan rendah sekali. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-2020 berdasarkan analisis rasio keserasian belanja modal dibandingkan belanja operasional, dapat dilihat bahwa belum ada keserasian, dimana masih terlalu tinggi persentase belanja operasional apabila dibandingkan dengan belanja modal. Berdasarkan rasio pertumbuhan keuangan daerah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih berada pada kategori sangat rendah. (Deswira, 2022)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elly Karmedi dkk dengan judul Analisis Kemandirian Daerah Dan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Sumbawa dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah kabupaten sumbawa tahun 2015-2019 masih tergolong rendah sekali atau memiliki pola sifat instruktif, yaitu sebesar 17,02%. Hal ini berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa. Derajat desentralisasi fiskal secara rata-rata adalah sebesar 10,67 berada pada kategori kurang. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten Sumbawa harus lebuah mengoptimalkan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian fiskal secara lebih efektif. (Karmeli et al., 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh choiroel dkk yang berjudul Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto Berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah yaitu Selama tahun 2000 – 2019 rasio kemandirian keuangan daerah masih berada pada berada pada tingkat rendah sekali (RS) karena berada pada rentang persentase 0% - 25% dengan pola hubungan instruktif. (Woestho et al., 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Dani Melmambessy dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas Menunjukkan Hasil Bahwa Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jayapura selama tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang

sedang yaitu 23,14%. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat Kota Jayapura dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah adalah sedang, sehingga membuat Pemerintah Daerah Kota Jayapura masih tergantung kepada sumber lain (pihak ektern). (Melmambessy, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Neya Arafah dkk dengan judul Analisis kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di kabupaten kotawaringin barat menemukan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada kategori rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama tahun 2009-2018. Tingkat kemandirian keuangan daerah secara langsung mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah sedangkan secara langsung mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar. Tingkat kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. (Arafah et al., 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Fahriansyah Syam dkk dengan judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana menemukan bahwa Kemandirian Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 masih sangat rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 95,67%, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 3,67%, rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah 111,54%, sehingga dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang dan bergantung pada pemerintah pusat. (Syam & Zulfikar, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Jalu Aji Prakoso dkk dengan judul Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah Hasil analisis rasio kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dapat dikatakan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam kondisi kemampuan keuangan yang sangat kurang. (Sugiharti et al., 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana Silondae yang berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kendari jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Kota Kendari tahun 2020 berjalan Efektif karena efektivitasnya diatas 100% yaitu sebesar 101,28%. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 Tidak Efektif karena nilai yang diperoleh kurang dari 100% yaitu sebesar 61,08% dan 77,86%. Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kendari jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kota Kendari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebesar 103,69% atau dapat dikatakan Tidak Efisien. Berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan 2022 rasionya masing-masing sebesar: 95,13%, 104,29% dan 111,65%. (Haksanggulawan et al., 2023)

Penelitian yang berjudul "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu" oleh Rozi Efriyanto dan Helmi Herawati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan

data kuantitatif dari laporan keuangan daerah selama periode 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio tingkat kemandirian keuangan pada kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah 6,88%, menunjukkan pola hubungan yang instruktif. Selain itu, rasio efektivitas sebesar 87,91% menunjukkan hubungan yang cukup efektif, meskipun rasio efisiensi yang sangat tinggi (1.841,87%) mencerminkan kinerja keuangan yang tidak efisien karena biaya belanja daerah lebih besar daripada realisasi PAD. Kesimpulannya, meskipun terdapat peningkatan PAD, ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih tinggi, yang berdampak negatif pada kemandirian keuangan daerah. (Efriyanto et al., 2023)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2020-2022. Menggunakan teori Mahmudi sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menganalisis kemandirian keuangan daerah melalui empat indikator utama: derajat desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi ini memberikan kontribusi baru dengan memperbarui data dan analisis kemandirian keuangan daerah pasca-pandemi COVID-19, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2020-2022 dengan menggunakan teori Mahmudi dan empat indikator utama: derajat desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan spesifik penelitian ini meliputi: mengukur tingkat desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri; menilai sejauh mana Kabupaten Belitung Timur mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk mengidentifikasi tingkat otonomi fiskal daerah; menghitung tingkat ketergantungan keuangan daerah pada dana transfer pemerintah pusat guna mendapatkan gambaran ketergantungan pada dana eksternal; mengevaluasi efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan PAD dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta mengidentifikasi peluang peningkatan kontribusi PAD; menyediakan data dan analisis terbaru mengenai dinamika keuangan daerah setelah pandemi COVID-19 sebagai dasar strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kemandirian keuangan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Belitung Timur dan memperkaya literatur akademik di bidang keuangan daerah dan desentralisasi fiskal.

II. METODE

Pendekatan penelitian merupakan proses esensial dalam mencari kebenaran terhadap suatu fenomena yang ingin diketahui. Untuk menghasilkan penelitian terbaik, peneliti harus memiliki kemampuan, keterampilan, serta memahami mekanisme dan teknis penelitian yang relevan dengan kajian tersebut. Seorang peneliti harus menggunakan pendekatan penelitian yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan selaras dengan objek yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan metodologi yang akan diterapkan.

Menurut Bogdan dan Biklen (Sugiyono, 2019), karakteristik penelitian kualitatif mencakup pengumpulan data dalam setting alami, deskriptif, fokus pada proses, dan pentingnya makna dari data yang diamati. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam keadaan alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif, merujuk pada proses, dan berfokus pada makna dari data yang dikumpulkan.

(Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa fokus penelitian sebenarnya ditentukan setelah peneliti melakukan observasi dan pertanyaan menyeluruh, yang juga dikenal sebagai penjelajahan umum. Spradley (Sugiyono, 2019) menjelaskan empat alternatif dalam menentukan fokus, yaitu berdasarkan isu-isu yang direkomendasikan oleh para saksi, area organisasi tertentu, penemuan yang menghargai kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta masalah yang berkaitan dengan hipotesis yang ada. Penetapan fokus penelitian akan membuat penelitian lebih terukur dan berdasarkan visi penelitian, memudahkan dalam menentukan data yang relevan. Penelitian ini mencakup analisis kemandirian keuangan daerah yang mencakup kemandirian finansial dan ketergantungan keuangan, serta faktor-faktor yang akan dimasukkan dalam tabel operasionalisasi konsep.

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data lisan atau verbal yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, seperti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Data sekunder adalah data pendukung yang mencakup SMS, foto, grafik, formulir, dan catatan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi dan data yang tepat dari individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang objek atau kondisi sosial yang dikaji. Informan yang dipilih adalah pejabat terkait yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dapat memberikan informasi tentang upaya pemerintah daerah dan faktor-faktor yang menghambat kemandirian keuangan daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi memungkinkan peneliti mengamati objek penelitian secara detail, kompleks, dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan interaksi langsung antara peneliti dan responden, yang dapat berupa wawancara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari objek penelitian seperti aturan, buku, laporan, foto, video, dan data lain yang relevan. Data sekunder yang dikumpulkan mencakup laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dan catatan arus laporan keuangan Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2020-2022. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguraikan dan menganalisis informasi yang diperoleh dari koleksi primer dan sekunder peneliti di lapangan. Informasi pokok penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan. Data ini merupakan data primer yang dalam analisisnya didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait untuk mempertajam dan memperluas hasil analisis. Penelitian ini memaparkan tentang kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur, faktor-faktor yang menghambat terjadinya keuangan kemandirian pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur khususnya ditinjau dari pendapatan primer daerah dan kinerja

pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung pemerintah meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

3.1. Daerah Kabupaten Belitung Timur Belum Mandiri

3.1.1 Pendapatan Transfer Masih Tergolong Tinggi

Selain pendapatan internal, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga didapatkan oleh Kabupaten Belitung Timur. Data menunjukkan bahwa pendapatan transfer Kabupaten Belitung Timur meningkat dari Rp. 655.882.482.735 pada tahun 2020 menjadi Rp. 702.824.869.753 pada tahun 2021, dan naik lagi menjadi Rp. 792.063.720.025 pada tahun 2022. Rata-rata, pendapatan transfer ini berkontribusi sebesar 84,57% terhadap total pendapatan, menunjukkan tingginya ketergantungan Kabupaten Belitung Timur terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Belitung Timur belum sepenuhnya mencapai kemandirian finansial. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah yang berada di bawah target, namun juga karena pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur bergantung pada dana transfer pemerintah. Jika hal ini tidak ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur, ketergantungan finansial daerah ini terhadap dana transfer akan semakin meningkat, sementara kemandirian finansialnya akan semakin menurun.

3.1.2 Pendapatan Daerah Masih Didominasi Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah adalah elemen kunci dalam menentukan kemandirian finansial suatu wilayah. Ini merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan dan proyeknya sendiri. Kabupaten Belitung Timur, sebagai contoh, memiliki catatan pendapatan daerah selama tiga tahun terakhir (2020-2022) yang dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tabel berikut memberikan gambaran tentang target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur selama periode anggaran 2020 hingga 2022. Data ini disajikan berdasarkan rincian sumber penerimaan, memberikan wawasan tentang bagaimana pendapatan daerah ini berasal dan bagaimana distribusinya sepanjang tahun tersebut

Tabel 3. 1

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Pencapaian Periode Anggaran 2020-2022 Berdasarkan Data Sumber Pendapatan

NO	KEGIATAN	PERIODE		
		2020	2021	2022
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	TARGET	122.010.457.341	111.210.150.282	128.256.199.761
	REALISASI	102.159.584.856	116.077.337.746	119.032.928.247
2	DANA TRANSFER			
	TARGET	765.891.023.231	711.806.165.440	746.010.500.214
	REALISASI	655.882.482.735	702.824.869.753	792.063.720.025
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			

	TARGET	27.438.958.000	24.595.282.437	8.646.848.214
	REALISASI	18.456.098.506	27.420.519.859	7.514.824.022
4	TOTAL PENDAPATAN DAERAH			
	TARGET	887.891.154.500	847.611.598.159	882.913.548.189
	REALISASI	776.507.166.240	846.322.727.359	918.611.472.294
5	TRANSFER PUSAT + PROVINSI + PINJAMAN			
	TARGET	766.827.475.926	713.407.982.540	746.510.500.214
	REALISASI	656.455.786.135	703.291.602.756	792.362.684.825

Sumber : Data yang diolah LRA APBD Kabupaten Belitung Timur periode 2020-2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui perkembangan pendapatan daerah periode 2020-2022 pada Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan pada periode 2021 dan mengalami peningkatan pada periode 2022. Jika dilihat dari persentase pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, secara keseluruhan masing-masing sektor pendapatan daerah mampu memenuhi tujuan tersebut.

3.1.3 Pendapatan Asli Daerah Masih Rendah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Timur merupakan elemen kunci dalam menilai kemandirian keuangan daerah tersebut. Hal ini mencakup pengelolaan potensi daerah dan sumber pendapatan lainnya yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk terpenuhinya semua kebutuhan pemerintah. Data yang tercatat menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Belitung Timur belum mencapai tingkat optimal, dengan kontribusi PAD hanya berkisar antara 12%-13%. Secara rata-rata, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 13,2% selama periode 2020-2022.

3.2 Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

3.2.1 Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Masih Belum Maksimal

Tentu saja kinerja perekonomian Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dari pendapatan primer daerah yang ada. diantaranya pendapatan daerah. pajak dan biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Belitung Timur sangat ditentukan oleh sistem administrasi yang bertugas mengoptimalkan kemandirian pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Primer Daerah (PAD) serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

3.2.2 Belum Efektif dan Efisien Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Kabupaten Belitung Timur hanya menerima satu tahun pendapatan PAD yang telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Belitung Timur. Tidak sampai disitu saja, pelaksanaan belanja daerah tidak pernah mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap tahunnya masih terdapat anggaran yang cukup besar yang harus digunakan untuk membiayai kegiatan penunjang pembangunan daerah.

3.2.3 Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dana Transfer

Ketergantungan Kabupaten Belitung Timur pada transfer merupakan kendala eksternal terhadap kapasitas fiskal daerah, karena subsidi dari pemerintah pusat atau provinsi memberikan porsi yang lebih besar terhadap total pendapatan daerah Lampungani dibandingkan PAD Lampungani itu sendiri. Pasalnya APBD Pemerintah Belitung Timur tahun anggaran 2020-2022 masih bergantung dan menguasai kontribusi pihak eksternal yang cukup besar, dimana pemerintah pusat berperan penting dalam mendorong kegiatan dan program pembangunan daerah. Ketergantungan tersebut diwujudkan dengan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Besarnya dana transfer ini juga disebabkan oleh adanya bea masuk yang dibebankan negara kepada pemerintah kabupaten. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah daerah dan, jika hal ini terus berlanjut, daerah tidak dapat secara optimal memanfaatkan peluang-peluang di daerahnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan PAD daerah dan juga menurunkan PAD daerah. ketergantungan terhadap pendapatan remitansi.

3.3 Upaya Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

Wewenang yang diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) tentunya memberikan keleluasan bagi BPKPD dan pemerintah daerah kabupaten Belitung Timur untuk dapat menentukan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Timur yang akan diterima melalui penetapan target penerimaan pendapatan daerah sehingga besar dan kecilnya PAD Kabupaten Belitung Timur juga tentunya ditentukan oleh bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur.

Upaya yang dimaksudkan adalah tentang bagaimana sumber PAD Kabupaten Belitung Timur dapat berkembang baik dari segi kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk pendapatan PAD dan penghimpunan pendapatan daerah. Meningkatkan sumber pendapatan daerah sesuai kapasitas, tentunya memanfaatkan potensi daerah yang dapat digali secara maksimal agar tidak ada potensi daerah yang ada di Pemerintah Daerah Belitung Timur yang terabaikan dan dikelola karena banyaknya daerah. memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu, BPKPD harus cermat dan cermat dalam mencari peluang sumber pendapatan lain dari PAD, serta beberapa strategi, agar realisasi pendapatan PAD dapat mencapai hasil yang melebihi target imbal hasil yang telah diberlakukan.

Berikut beberapa strategi dan langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur. Wilayah Belitung Timur :

- a. Memperbarui informasi wajib pajak dan informasi izin sehingga dapat dipublikasikan;
- b. Pengumpulan informasi tentang wajib pajak baru dan pembayaran daerah;
- c. Penetapan kembali jumlah dan biaya yang harus dibayar oleh wajib pajak;
- d. Penerapan upaya pengendalian pajak pada restoran/restoran dan tempat yang menggunakan izin usaha serta meningkatkan pengendalian penerimaan pajak, pembayaran dan penjualan barang daerah, termasuk PAD lainnya yang sah;

- e. Meningkatkan kesadaran dan menyadarkan masyarakat khususnya wajib pajak akan tanggung jawabnya dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
- f. Berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait dan dinas daerah.

Sementara kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan di atas, adapun beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur antara lain :

- a. Menerbitkan Surat Setoran Objek Pajak PBB (SPOB) kepada masyarakat yang mempunyai harta berupa tanah dan bangunan namun belum termasuk dalam PBB;
- b. Menginstruksikan kepada Pemerintah Negara Bagian Belitung Timur untuk menjadikan seluruh aparatur Pemerintah Negara Bagian Belitung Timur sebagai teladan dalam pembayaran PBB-P2;
- c. Melaksanakan Rapat Peninjauan Pendapatan PBB-P2 bulanan dengan OPD, Pengurus Sub Daerah dan Kepala Desa;
- d. Memberikan insentif kepada Kepala Desa/Lurah dan Pengelola Kecamatan yang memiliki tarif penggantian PBB-P2 tertinggi di wilayahnya.

Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur saat ini sedang aktif berupaya meningkatkan pelaksanaan pemungutan dan pelaporan pajak daerah dengan memberikan insentif kepada wajib pajak meningkatkan kesadaran tentang pajak daerah dan pembayaran online sesuai perkembangan teknologi, dengan harapan adanya kenaikan pajak.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur, diskusi bersama Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ibu Mastutriana, SE., serta Sekretaris Badan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur (BPKPD), Elvia Kirana, SE, M.Si., dan Bapak Zuhri, S.Mn., mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Ibu Mastutriana menekankan bahwa upaya peningkatan PAD sedang diintensifkan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada serta pengembangan potensi baru. Namun, realisasi PAD masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan kapasitas pengelolaan yang perlu ditingkatkan.

Kedua, analisis kemandirian daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Elvia Kirana menggarisbawahi bahwa meskipun ada beberapa kemajuan dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan, persentase ketergantungan terhadap dana transfer masih signifikan. Beliau mencatat bahwa salah satu langkah strategis yang sedang dilakukan adalah peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran dan penegakan peraturan daerah yang lebih ketat untuk mendorong peningkatan PAD. Selain itu, pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan perikanan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Terakhir, efektivitas pengelolaan PAD menjadi fokus penting dalam diskusi ini. Bapak Zuhri menyoroti bahwa meskipun target PAD setiap tahunnya cenderung tercapai, masih terdapat

kesenjangan antara target dan realisasi PAD. Faktor-faktor seperti pengelolaan yang belum optimal dan tantangan dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, Kabupaten Belitung Timur telah menginisiasi beberapa program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas pengelola keuangan daerah. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan efektivitas PAD dan kemandirian keuangan daerah secara keseluruhan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, penelitian ini juga mengungkap beberapa temuan menarik terkait analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur. Salah satu temuan yang patut dicatat adalah adanya inisiatif pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Melalui forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan terkait prioritas pembangunan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetapi juga mendorong sense of ownership dari masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dibiayai oleh PAD. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik beberapa kesimpulan penting mengenai otonomi ekonomi daerah di Wilayah Administratif Belitung Timur. Pertama, kemandirian perekonomian daerah diukur melalui analisis laporan keuangan menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Indeks desentralisasi fiskal tahun 2020-2022 sebesar 13,27% mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah Belitung Timur belum mencukupi untuk membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri. Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah dalam periode yang sama mencapai 84,57%, menandakan bahwa daerah ini masih sangat bergantung pada pendapatan dari dana transfer dan dukungan keuangan provinsi.

Selain itu, rata-rata rasio kemandirian keuangan pada tahun 2020-2022 hanya sebesar 15,69%, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian ekonomi Belitung Timur masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran negara masih sangat dominan dalam pembiayaan pemerintahan daerah. Sementara itu, rata-rata rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) selama periode tersebut mencapai 93,01%, menunjukkan bahwa meskipun efisiensi dalam pelaksanaan PAD cukup efektif, hal ini belum cukup untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara signifikan.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data yang hanya meliputi periode 2020-2022, yang mungkin tidak cukup untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dalam kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, penelitian ini bergantung pada data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah, yang bisa saja memiliki keterbatasan dalam akurasi dan kelengkapan informasi. Proses wawancara yang dilakukan juga mungkin menghadapi bias dari informan yang dipilih, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas hasil analisis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk mengarahkan masa depan penelitian, penting untuk memperluas cakupan waktu penelitian agar mencakup periode yang lebih panjang guna memahami tren jangka panjang dalam kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, mengintegrasikan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam, seperti studi kasus dan observasi langsung, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan model analisis yang lebih kompleks untuk mengidentifikasi secara lebih akurat faktor-faktor penyebab rendahnya kemandirian keuangan daerah serta menganalisis dampaknya secara lebih mendalam. Selain itu, menggabungkan data sekunder dengan pengumpulan data primer, seperti survei atau wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, juga dapat meningkatkan kedalaman analisis dan validitas hasil penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur atas kerjasama, dukungan, dan kontribusi yang luar biasa dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan bantuan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, penelitian ini tidak akan terwujud. Kontribusi yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sangat berharga dalam memperkaya hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan dan perbaikan kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Belitung Timur. Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya yang tidak ternilai harganya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, N., Neneng, S., & Marpaung, K. (2021). Analisis kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di kabupaten kotawaringin barat. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.52300/jepp.v1i1.3505>
- Deswira, A. (2022). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah : studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 72–88.
- Efriyanto, R., Herawati, H., Yuliana Sari, N., & Hazairin. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 4(2), 121–133. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i2.129>
- Haksanggulawan, A., Hajar, I., & Putera, A. (2023). Neraca Neraca. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari*, 1(2), 401–407.
- Karmeli, E., Haryadi, W., & Muslimin, M. (2022). Analisis Kemandirian Daerah Dan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 52–60. <https://doi.org/10.58406/jeb.v10i1.730>

- Kuncoro. (2004). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>
- Risdiyanto, E., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Review*, 11(2), 1813–1822.
- Sinurat, M. & Panjaitan, H.S (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Sugiharti, R. R., Prakoso, J. A., & Islami, Fi. S. (2019). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah Analisis. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 87–100.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabeta.
- Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R. K. (2020). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2), 182–191. <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i2.625>